

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penelitian ini merupakan salah satu kajian isu-isu internasional domestik, karena adanya kebijakan di tingkah pemerintah daerah merupakan pengaruh dari sistem internasional. Kerjasama *Sister City* merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota disatu negara dengan Pemerintah Kota di luar negeri, yang berfokus pada hubungan persahabatan antar kota dan saling memahami satu sama lain. Pada saat ini kerjasama *Sister City* lebih berfokus kepada bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing negara untuk mendapat suatu keuntungan bagi keduanya. Semakin berkembangnya zaman, kerjasama *Sister City* dilihat dapat membantu Pemerintah dalam membimbing Pemerintah Daerah dan masyarakatnya untuk ikut serta dalam pembangunan kota melalui kerjasama *Sister City*.<sup>1</sup> Kerjasama *sister city* di Kota Bandung sendiri telah berlangsung sejak tahun 1960, namun mulai diterapkan secara formal pada tahun 1992.<sup>2</sup> Kerjasama *sister city* Kota Bandung menarik untuk dianalisis pada masa Pemerintahan di era Ridwan Kamil, karena Kota Bandung telah menjalin 14 kerjasama *Sister City* di berbagai

---

<sup>1</sup> Andi Oetomo, "Pengelolaan Perkotaan Lewat Skema Sister City," vol. 1, n.d., [http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data\\_artikel/edisi3i.pdf](http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data_artikel/edisi3i.pdf); Connect Globally and Thrive Locally, "Sister Cities International," 2019, <https://sistercities.org/about-us/what-is-a-sister-city-3/>; Renata Edzgar Yosephine Manullang, "Urgensi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Sister City Di Indonesia," 2014, <https://doi.org/10.1192/bjp.112.483.211-a>. (22-06-2018, 10:00 WIB)

<sup>2</sup> Bagian Kerjasama kota Bandung, "*Sister City*," 2019, <http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/sister-city>. (22-06-2018, 10:00 WIB)

kota di seluruh dunia.<sup>3</sup> Pada masa Pemerintahan di Era Ridwan Kamil, Kota Bandung ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang merujuk pada konsep smart city.<sup>4</sup> Sehingga menarik untuk dianalisis implementasi kerjasama *sister city* Kota Bandung dalam rangka mewujudkan konsep smart city.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Villers bahwa kemitraan *Sister City* didorong oleh kekuatan globalisasi dengan tujuan untuk mengetahui dan meningkatkan daya saing.<sup>5</sup> Dapat dilihat bahwa globalisasi memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kehidupan manusia, bahkan seluruh aspek didalamnya, termasuk menciptakan berbagai macam bentuk kerjasama, salah satunya yaitu kerjasama *Sister City*. Jika pada awalnya kerjasama *Sister City* hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, namun seiring berjalannya waktu, sadarnya sebuah negara yang ada di dunia bahwa tidak dapat selalu mencari keuntungan potensi dari negara lain. Akhirnya saat ini Pemerintah Daerah dapat ikut serta dalam kegiatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah di luar negeri.<sup>6</sup> Kota Bandung sebagai unit analisis dalam penelitian ini.

Sebagai ibu kota Jawa Barat, Kota Bandung juga merupakan kota terbesar urutan ketiga di Indonesia. Bandung yang terkenal sebagai kota yang memiliki banyak keunggulan, salah satunya Bandung merupakan kota sebagai pusat

---

<sup>3</sup> Bandung.

<sup>4</sup> “Smart City,” 2014, <https://doi.org/10.1007/978-3-319-06160-3>; Yoyok Yulistira Suyono, “Bandung Smart City,” *Siemens*, no. September (2016): 1–20, [www.siemens.asia](http://www.siemens.asia) › Bandung\_Study\_Book\_ID.sflb.ashx; Siti Widharetno Mursalin, “Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung 2017,” *Jurnal Ilmu Administrasi* 14 (2017): 126, [https://www.researchgate.net/publication/324251217\\_IMPLEMENTASI\\_KEBIJAKAN\\_SMART\\_CITY\\_DI\\_KOTA\\_BANDUNG](https://www.researchgate.net/publication/324251217_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_SMART_CITY_DI_KOTA_BANDUNG). (2-09-2019, 10.00 WIB)

<sup>5</sup> J. C. Villers. 2009. *Success Factors and the City-to-City Partnership Management Process – From Strategy to Alliance Capability*. Habitat International, hlm 154.

<sup>6</sup> Sister Cities, diakses dalam <http://www.sistercities.org/> (22-01-2018, 13:23 WIB)

perekonomian, pabrik, atau pusat dari brand lokal Indonesia banyak terletak di Bandung. Selain itu Bandung juga merupakan kota yang unggul dalam bidang pariwisatanya, tidak sedikit para turis dari luar negeri yang berkunjung ke Bandung dan pendatang dari berbagai macam kota yang ingin berlibur ke Bandung. Terdapat wisata alam dengan pemandangannya yang indah, banyaknya pusat perbelanjaan yang dapat dikunjungi dengan harga yang terjangkau, wisata budaya yang dapat dinikmati, dan wisata teknologi.<sup>7</sup>

Adapun visi kota Bandung yaitu Bandung Unggul Nyaman dan Sejahtera. Unggul sendiri berarti menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan kota Bandung. Nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk tinggal serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kesejahteraan ialah yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengolahan sosial. Misi kota Bandung yaitu, (1) Mewujudkan kota Bandung Nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. (2) Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani. (3) Membangun masyarakat yang mandiri,

---

<sup>7</sup> Hendrini Renola Fitri and Faisyal Rani, "Implementasi Kerjasama Sister City Kota Bandung-Braunschweig (Tahun 2000-2013)," *Jurnal Transnasional* 5 (2013): 932.

berkualitas dan berdaya asing. (4) Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.<sup>8</sup>

Kerjasama *Sister City* yang dilakukan oleh Kota Bandung pertama kali dilakukan bersama Kota Braunschweig, Jerman. Kerjasama *Sister City* ini dilakukan pada tahun 1960. Awal dari Kerjasama ini dicetuskan oleh Prof. Dr. George Eckert yang merupakan staf UNESCO. Prof. Dr. George Eckert menyampaikan keinginannya untuk melakukan kerjasama *Sister City* dengan kota Bandung, yakni telah melihat adanya kemiripan universitas di Braunschweig yaitu Gossische Hochschule dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Sehingga pada awalnya menjalin hubungan kerjasama antar universitas. Tidak hanya dengan kota Braunschweig, Bandung juga mempunyai rekan kerjasama *Sister City* dengan Forthworth (USA), Suwon (Korea), Yingkou (RRC), Lizhou (RRC), Petaling Jaya (Malaysia), Shenzhen (RRC), Hamamatsu (Jepang), Seoul (Korea), Nammur (Belgia), Toyota City (Jepang), Catobato (Filipina), dan Cuenca (Ecuador).<sup>9</sup>

Pada awalnya konsep Kerjasama *Sister City* digunakan oleh kota Keighley, Inggris dengan kota Poix Du Nord di Benua Eropa pada tahun 1920. Di benua Eropa lebih sering menggunakan istilah Twin City, berbeda dengan Amerika Serikat yang lebih suka menggunakan istilah *Sister City*. Kerjasama *Sister City* dilakukan oleh antar kota atau daerah setingkat provinsi yang memiliki beberapa kesamaan

---

<sup>8</sup> Diskominfo Kota Bandung, "Visi Misi Kota Bandung," Portal Resmi Kota Bandung, 2016, <https://portal.bandung.go.id/posts/2005/08/01/QR17/visi-dan-misi>. (22-01-2018, 12:22 WIB)

<sup>9</sup> Bagian Kerjasama Kota Bandung, "Sister City," Bagian Kerjasama Kota Bandung, 2017, <http://kerjasama.bandung.go.id/luar-negeri/sister-city>. (22-01-2018, 12:22 WIB)

karakteristik, contohnya kesamaan pada bidang kebudayaan, sejarahnya, maupun latar belakangnya atau bisa juga dilihat dari aspek geografinya.<sup>10</sup>

Berdasarkan PERMENDAGRI nomor 1 pada tahun 1922 yang menjelaskan bahwa kerjasama *Sister City* merupakan hubungan kerjasama kota yang bersaudara dan dilakukan oleh Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten ataupun Pemerintah Kota Administratif dengan Pemerintah Kota di luar negeri yang sejajar. Oleh sebab itu Kota Bandung ingin meningkatkan potensi yang dimilikinya dengan cara melakukan kerjasama pemerintahan dengan menggunakan model kerjasama *Sister City* dengan kota di luar negeri. Adapun bidang-bidang kerjasama *Sister City* antara lain di bidang Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata. Adapula di dalam bidang Ilmu pengetahuan, teknologi, administrasi, Pendidikan, kebudayaan, Kesejahteraan sosial, pertukaran pemuda, dan Olahraga, serta bidang-bidang lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Dalam melakukan kegiatan kerjasama *sister city*, perlu adanya tata kelola pemerintah daerah dan otonomi daerah dari daerah atau kota itu sendiri. Tata kelola pemerintahan pada dasarnya mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga - lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan - perbedaan diantara mereka.<sup>12</sup> Rondinelli dalam Mugabi mengartikan desentralisasi sebagai penugasan (assignment), pelimpahan (transfer), atau pendelegasian tanggungjawab aspek politik, administratif dan keuangan (fiscal)

---

<sup>10</sup> Bagian Kerjasama Kota Bandung.

<sup>11</sup> Bagian Kerjasama Kota Bandung.

<sup>12</sup> Krina P, "Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi," *Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2003.

pada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah.<sup>13</sup> Konsep desentralisasi mengandung dua elemen yang saling berhubungan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang - bidang pemerintahan tertentu, baik yang dirinci maupun dirumuskan secara umum. Oleh karena itu, desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritori tertentu. Suatu masyarakat yang semula tidak berstatus otonomi, melalui desentralisasi menjadi berstatus otonomi sejalan dengan pemberlakuan daerah otonom. Otonomi, dengan demikian diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat bukan kepada daerah ataupun pemerintah daerah.<sup>14</sup> Sebelum diterapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah ataupun Permendagri No. 3 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak luar negeri, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengizinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Adapun konteks kerjasama antar pemerintah daerah luar negeri ini dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang menjelaskan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Adapun kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan lembaga atau pemerintah di luar negeri sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undang.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Rozan Anwar, "Pengembangan Model Administrasi Publik," *Fisip UI*, 2009, 5.

<sup>14</sup> Bhenyamin Hossein, "Kebijakan Desentralisasi," *Jurnal Administrasi Negara II*, no. 2 (2002): 3.

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, BAB XVII Pasal 363 Ayat 1 dan 2, hlm 192.

Pemerintah Daerah kota Bandung menerapkan model Pembangunan Smart City. Walikota Bandung memperkenalkan konsep Bandung Smart City pada tahun 2013. Awal mula direalisasikan Bandung Smart City adalah untuk perwujudan Bandung juara sebagai kota yang bermatabat. Hingga pada tahun 2015 Bandung mampu menjadi finalis *World Smart City* dalam *Smart City Expo World*.<sup>16</sup>

Smart City merupakan suatu konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.<sup>17</sup> Dengan kata lain Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas atau pintar yang membantu masyarakat kota mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi aktivitas secara *real time*.<sup>18</sup>

Dengan mempertimbangkan isu-isu internasional dan domestik, dalam konteks kerjasama pembangunan internasional sebagai bagian dari studi Hubungan Internasional, maka penelitian ini tertarik untuk mengetahui bagaimana Implementasi kerjasama *Sister City* kota Bandung dalam rangka mewujudkan konsep Smart City.

---

<sup>16</sup> Meita Fajriana, "Ridwan Kamil Pamer Bandung Finalis World Smart City 2015," liputan 6, 2015, <http://lifestyle.liputan6.com/read/2368367/ridwan-kamil-pamer-bandung-finalis-world-smartcity-2015>. (14-04-2018, 13:00 WIB)

<sup>17</sup> Mursalim, "Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung 2017."

<sup>18</sup> Mursalim.

## 1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana Pemerintah Kota Bandung mengimplementasikan kerjasama *sister city* untuk mewujudkan konsep *smart city* di era pemerintahan Ridwan Kamil?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka mewujudkan Konsep *Smart City* melalui Kerjasama *Sister City*.

## 1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi bahan pertimbangan untuk menunjukkan perbedaaan penelitian ini dengan penelitian lain yang pernah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan kerjasama Internasional.

*Pertama*, Menurut Renata Edzgar Yosephine dalam tulisannya yang berjudul “Urgensi *Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Sister City di Indonesia*” tentang pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan Siste City di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitiannya, ditemukan adanya faktor tidak terpenuhinya pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang berdampak luas pada pelaksanaan program sister city di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan penggunaan bentuk perjanjian dalam kerjasama *sister city* yaitu MoU, yang memiliki kekuatan



mengikat yang lemah karena tidak menjelaskan hak dan kewajiban para pihak perjanjian secara rinci.<sup>19</sup>

**Kedua,** penelitian Mariyo Saputra, (2017) dengan judul *Implementasi Kerjasama Sister City Bandung-Suwon Terhadap Pembangunan Sosial Dan Ekonomi Di Kota Bandung. Penelitian ini menjelaskan bagaimana kerjasama sister city yang terjadi antara kota Bandung dengan Suwon dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi kota Bandung. Penelitian ini menggunakan konsep kerjasama internasional sebagai alat untuk menganalisis permasalahan penelitian.*<sup>20</sup>

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama berusaha untuk menganalisis dari implementasi kerjasama *Sister City yang dilakukan antar dua kota. Sementara perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini fokus pada kerjasama kota Bandung dengan Suwon, sedangkan penelitian ini fokus pada kerjasama kota Bandung dengan semua kota yang menjadi sister city dengan Bandung. Selain itu, penelitian ini berusaha mengkaji kerjasama sister city yang fokus dalam bidang sosial dan ekonomi, sedangkan penelitian yang dilakukan fokus dalam mewujudkan konsep Smart City kota Bandung yang menekankan pada kerjasama sister city dalam masa pemerintahan Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung pada masa jabatan tahun 2013-2018.*

**Ketiga,** “kewenangan Pemerintah kota Bandung dalam menjalankan kerjasama Sister City dengan kota Braunschweig Tahun 2000-2012” oleh

---

<sup>19</sup> Manullang, “Urgensi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Sister City Di Indonesia.”

<sup>20</sup> Mariyo Saputra, “Implementasi Kerjasama Sister City Bandung-Suwon Terhadap Pembangunan Sosial Dan Ekonomi Di Kota Bandung,” *Skripsi Universitas Pasundan Bandung*, 2017.

Akbarizal Alireksa Bashar. Menjelaskan bahwa Kerjasama *Sister City* merupakan salah satu bentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah merupakan aktor yang dapat memberikan keuntungan hingga kontribusi bagi pemerintah dan masyarakatnya. Menurutnya, *Sister City* yang dilakukan oleh kota Bandung dengan Braunschweig berawal dari keinginan Prof. Dr. George Eckert yang melihat kemiripan pada universitas dengan kota Bandung. Piagam persahabatan Bandung-Braunschweig yang ditandatangani oleh walikota Bandung yaitu R. Priatnu Kusumah dengan Prof. Dr. George Eckert selaku utusan kota Braunschweig di Bandung pada tanggal 2 Juni 1960. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Bandung dengan Braunschweig merupakan kerjasama dibidang pendidikan berdasarkan saran dari salah satu staff UNESCO pada tahun 1960. Kerjasama *Sister City* yang dilakukan oleh Bandung dan Braunschweig memberikan dampak bagi perkembangan politik di Indonesia. Kerjasama *Sister City* Bandung dengan Braunschweig yang diwewenangi oleh pemerintah kota Bandung memiliki hambatan terhadap kepentingan politik suatu pemerintahan pusat maupun daerah. Oleh sebab itu, kerjasama *Sister City* antara pemerintah Bandung dengan Braunschweig diperlukan dukungan dan dikembangkan oleh berbagai pihak yang terkait dengan kerjasama *Sister City* ini. Kewenangan pemerintah kota Bandung dalam menjalankan kerjasama *Sister City* dengan Braunschweig cukup optimal, tetapi tetap perlu adanya perkembangan yang lebih

mendalam untuk merealisasikan kerjasama *Sister City* ini agar manfaat dari adanya kerjasama *Sister City* ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak.<sup>21</sup>

***Keempat***, Dyah Estu Kurniawati dengan judul “*Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah (Studi Pada Pemkab Malang)*”<sup>22</sup>.

Adapun kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Malang, seperti; kerjasama antar Pemkab Malang dengan USAID berupa Local Government Program (LGSP) program ini pemberian materi dan pendampingan dalam tata kelola pemerintahan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dan tidak berupa dana segar (fresh money), bekerjasama juga dengan ILO (International Labour Organization) pada tahun 2008 sampai tahun 2009 proyek JOY (Job Opportunities Four Youth), membahas akan membentuk pemerintah kabupaten Malang khususnya pada penanggulangan pengangguran bagi kaum muda. Kemudian dengan KOLKA (Korea International Cooperation Agency), mengirimkan sukarelawan kota ke Kabupaten Malang untuk bertukar keahlian, pengetahuan, dan pengalaman mereka dengan tujuan turut berkontribusi secara langsung dalam pengembangan sosial ekonomi di Kabupaten Malang. Adapun tantangan bagi Kabupaten Malang yaitu minimnya tenaga ahli dalam bidang kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dalam melaksanakan kerjasama luar negeri.

---

<sup>21</sup> Akbarizal Alireksa Bashar, “Kewenangan Pemerintah Kota Bandung Dalam Menjalankan Kerjasama *Sister City* Dengan Kota Braunschweig Tahun 2000-2012,” *Jurnal HI, FISIP - Universitas Komunikasi Indonesia*, 2014, <https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/656/jbptunikompp-gdl-akbarizala-32758-12-jurnal-4-r.pdf>. (21-01-2018, 17:22 WIB)

<sup>22</sup> Dyah Estu Kurniawati, “*Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah (Studi Pada Pemkab Malang)*,” *Jurnal Humanity* 5, no. 3 (2010).

*Kelima, “Implementasi Kerjasama Sister City Studi Kasus Sister City Bandung-Braunschweig (Tahun 2000-2013)”<sup>23</sup>*, oleh Hendirini Renola Fitri & Faisyal Rani. Penelitian ini membahas tentang kerjasama sister city Kota Bandung dan Braunschweig, Jerman. Penelitian ini melihat bagaimana hubungan kerjasama sister city Kota Bandung dengan Kota Braunschweig dari tahun 2000 hingga 2013, dan juga untuk memberitahu manfaat yang di dapatkan dari kerjasama sister city yang dilakukan oleh Kota Bandung dengan Kota Braunschweig. Hasil penelitian yang dapatkan dari penilitian ini melihat bahwa adanya kemiripan karakteristik yang dirasakan oleh kedua kota. Hubungan kerjasama sister city Kota Bandung dan Braunschweig ini guna untuk meningkatkan potensi dan keunggulan yang telah dimiliki oleh kedua kota.

**Tabel 1.1 Posisi Penelitian Terdahulu**

No.	Judul dan Nama Penelitian	Konsep dan Teori	Hasil Penelitian
1	Urgensi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Sister City di Indonesia.  Oleh : Renata Edzgar Yosephine	Jenis Penelitian : Deskriptif	Adanya Faktor tidak terpenuhinya pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang berdampak luas pada pelaksanaan program Sister City di Indonesia. Dikarenakan penggunaan bentuk perjanjian dalam kerjasama Sister City yaitu MoU memiliki kekuatan mengikat yang lemah karena tidak menjelaskan hak dan kewajiban.

<sup>23</sup> Fitri and Rani, “Implementasi Kerjasama Sister City Kota Bandung-Braunschweig (Tahun 2000-2013).”

2	<p>Implementasi Kerjasama Sister City Bandung-Suwon Terhadap Pembangunan Sosial Dan Ekonomi Di Kota Bandung</p> <p>Oleh : Mariyo Saputra, (2017 Universitas Pasundan Bandung.</p>	<p>Jenis Penelitian : Deskriptif Kualitatif</p>	<p><i>Sister City</i> di kota Bandung memiliki kekurangan dalam implementasinya yang di mana ada beberapa hal yang harus pemerintah Bandung benahi, banyaknya kerjasama mitra kota atau <i>Sister City</i> ini menyebabkan kerjasama antara kota lain sedikit tidak berjalan dengan baik pergantian pemerintahan baru juga mengubah kebijakan terhadap kebijakan pemerintahan lama dan hal ini berdampak pula pada berjalannya program <i>Sister City</i> antara Kota Bandung dan Kota Suwon yang di mana pada saat ini kegiatan atau program kerjasama yang berjalan hanya sampai 2014, kegiatan tersebut bukan berarti berhenti namun tidak adanya interaksi kembali antara dua kota tersebut.</p>
3	<p>Kewenangan Pemerintah kota Bandung dalam Menjalankan Kerjasama Sister City dengan kota Braunschweig pada tahun 2000-2012.</p> <p>Oleh : Akbarizal Alireksa Bashar</p>	<p>Jenis Penelitian : Deskriptif kualitatif</p>	<p>Merupakan salah satu bentuk kerjasama Internasional oleh pemerintah daerah dimana daerah memiliki peranan sebagai aktor sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat di Indonesia. Kerjasama <i>Sister City</i> antara pemerintah kota Bandung dan Braunschweig masih perlu dukungan dan dikembangkan oleh berbagai pihak yang terkait</p>

			dengan kerjasama Sister City.
4	<p>Kerjasama Luar Negeri oleh pemerintah daerah di Era Otonomi Daerah (studi pada Pemkab Malang)</p> <p>Oleh : Dyah Estu Kurniawati</p>	Jenis Penelitian : Deskriptif kualitatif	<p>Program ini pemberian materi dan pendampingan dalam tata kelola pemerintah desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dan tidak berupa dana segar (fresh Money). Adapun tantangan bagi Kabupaten Malang yaitu minimnya tenaga ahli dalam bidang kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dalam melaksanakan kerjasama luar negeri.</p>
5	<p>Implementasi Kerjasama Sister City Studi Kasus Sister City Bandung-Braunschweig (Tahun 2000-2013)</p> <p>Oleh : Hendirini Renola Fitri &amp; Faisyal Rani</p>	Jenis Penelitian: Deskriptif kualitatif	<p>Hasil penelitin yang didapatkan dari penelitian ini melihat bahwa adanya kemiripan karakteristik yang dirasakan oleh kedua kota. Hubungan kerjasama sister city Kota Bandung dan Braunschweig ini guna untuk meningkatkan potensi dan keunggulan yang telah dimiliki oleh kedua kota.</p>

## 1.5 Konsep

### 1.5.1 Sister City

Konsep yang dilakukan oleh dua kota yang memiliki perbedaan lokasi dan Administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antar penduduk adalah konsep yang digunakan oleh *Sister City* atau Kota Kembar. Persamaan keadaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi umunya dimiliki oleh kota kembar atau *sister city*. Konsep yang dimiliki oleh kota kembar

dapat disebut sebagai persahabatan yang terjalin antar kedua kota. Program kerjasama dibidang perdagangan maupun budaya yang bermanfaat bagi berlangsungnya hubungan yang dimiliki oleh kota kembar.<sup>24</sup>

Kerjasama *Sister City* merupakan kerjasama jangka panjang yang dilakukan oleh dua kota yang berbeda Negara melalui pertukaran budaya, pendidikan, ekonomi dan teknis. Kerjasama ini terjalin ketika dua walikota atau pimpinan daerah terpilih dari kota yang berbeda Negara dengan menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Letter Of Intent (LoI)*. Ide awal program *sister city* sendiri di ciptakan pertama kali oleh Presiden AS Dwight Einsenhower.<sup>25</sup> Pada awalnya penerapan konsep ini adalah sebagai sarana untuk berdiplomasi mengenai politik negara ditingkat regional dan internasional. Pelaksanaannya menjadi pendorong bagi rakyat untuk menjalin persahabatan dan kerjasama yang konstruktif, baik antar elemen masyarakat kota, antar pemerintah lokal dan pusat, maupun antar Negara di seluruh dunia.<sup>26</sup>

*Sister City* merupakan sebuah istilah yang akrab digunakan untuk menyebut kerjasama-kerjasama antar kota di Indonesia dengan kota-kota dinegara lain, dimana istilah ini sesungguhnya dalam bahasa Indonesia disebut kota kembar atau *twining city*, kerjasama ini dilakukan baik itu berupa antar kota luar negeri maupun dalam negeri dimana kerjasama tersebut bersifat luas, disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang.

---

<sup>24</sup> Globally and Locally, "Sister Cities International." (21/01/2018, 17:22 WIB)

<sup>25</sup> Globally and Locally.

<sup>26</sup> Globally and Locally.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 2008 terkait dengan pembentukan kerjasama *Sister City* menjelaskan bahwa bila ada pemerintah daerah yang melakukan kegiatan kerjasama *Sister City* dengan pemerintah daerah lain baik dengan cara internal ataupun lintas negara, harus memperhatikan lima hal, yaitu:<sup>27</sup> (1) Kesamaan dalam status administrasi, (2) Kesamaan dalam Karakteristik, (3) Mempunyai permasalahan yang sama, (4) Usaha saling melengkapi satu sama lain, (5) Adanya peningkatan dalam hubungan kerjasama yang dijalin.

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ataupun Permendagri No. 03 tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang mengizinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Adapun konteks kerjasama antar-pemerintah daerah luar negeri ini dipertegas dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014. Tertulis dalam Undang-Undang tersebut, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Adapun kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak. Luar Negeri.

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; BAB XVII  
Pasal 363 Ayat 1 dan 2, hlm 192.



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 4 No. 3 Tahun 2008 telah memberikan memberikan penegasan kepada Pemerintah Daerah yang menjalankan kegiatan kerjasama *Sister City* harus memenuhi persyaratan, yaitu:<sup>29</sup> (1) Daerah yang melakukan kerjasama *Sister City* harus memiliki hubungan diplomatik, (2) Adanya delegasi yang tunjuk sebagai perwakilan daerah bila ada pertemuan, (3) Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab pada segala permasalahan dan perjanjian yang dilakukan dalam kerjasama *Sister City*, (4) Tidak ikut serta dalam urusan dalam negeri, (5) Kerjasama *Sister City* harus dilaksanakan secara rutin, mengingat ini sesuai dengan kesepakatan dan untuk rencana pembangunan.

Dalam penelitian ini, Kota Bandung juga melakukan Kerjasama *Sister City* dengan beberapa kota diluar negeri dengan aturan yang sama pada konsep *sister city* itu sendiri, sehingga penulis menggunakan konsep *Sister City* untuk mengetahui bahwa kegiatan kerjasama *Sister City* kota Bandung dengan kota diluar negeri mampu terimplementasikan dalam rangka mewujudkan *Smart City* kota Bandung.

### **1.5.2 Konsep Smart City**

Melihat perkembangan pada suatu kota yang terus bertambah jumlah penduduknya, sehingga membuat sumber daya alam semakin terbatas yang berdampak pada pengelolaan kota. Peran dari Pemerintah Daerah yang sangat

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak. Luar Negeri.

dibutuhkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan mengurangi masalah yang akan dihadapi. Kini konsep kota cerdas (smart city) telah banyak digunakan oleh kota-kota besar di seluruh dunia, guna memberikan peran dan kontribusi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan kota. Peran yang dilakukan antara masyarakat dan pemerintah daerah ini akan terus berkembang, sehingga nantinya mampu membuat kota menjadi nyaman, aman, kuat dalam menghadapi tantangan, serta perubahan.

Dalam literatur lain, kota cerdas atau smart city disebut dengan hubungan yang terjalin antara pemerintah kota, administrasi, dan masyarakatnya. Tata pemerintah yang baik sebagai aspek dari administrasi yang cerdas merujuk pada penggunaan saluran komunikasi baru untuk masyarakat, contohnya e-governance atau e-demokrasi. Smart city selanjutnya digunakan untuk membahas penggunaan teknologi modern dalam kehidupan perkotaan sehari-hari. Tidak hanya mencakup TIK, tetapi juga teknologi transportasi modern, logistic serta sistem transportasi baru sebagai sistem “cerdas” yang mampu meningkatkan lalu lintas perkotaan dan mobilitas penduduk. Selain itu berbagai aspek lain yang merujuk pada kehidupan di kota disebutkan sehubungan dengan istilah kota cerdas seperti keamanan atau keselamatan, hijau, efisien dan berkelanjutan, energi, dll.<sup>30</sup>

Dijelaskan dalam literature menurut Giffinger, R, dkk terdapat 6 karakteristik dalam smart city, smart economy, smart people, smart governance, smart mobility, smart environment, and smart living. Jelasnya, smar economy

---

<sup>30</sup> U Housing, “Smart Cities Ranking of European Medium Sized Cities,” *Smart Cities Final Report*, 2007, [http://www.smart-cities.eu/download/smart\\_cities\\_final\\_report.pdf](http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf). (21/01/2018, 17:22 WIB)

mencakup faktor-faktor di sekitar daya saing ekonomi seperti inovasi, kewirausahaan, merk dagang, produktivitas dan fleksibilitas pasar tenaga kerja, serta integrasi dalam pasar (internasional). Smart people disini tidak hanya dijelaskan oleh tingkat kualifikasi atau pendidikan setiap warga negara nya saja, tetapi juga oleh kualitas interaksi sosialnya mengenai integrasi dan kehidupan publik dan keterbukaan pengetahuan terhadap dunia “luar”. Smart governance merupakan tata kelola yang cerdas terdiri dari aspek partisipasi politik, layanan untuk warga negara serta fungsi administrasi. Aksesibilitas lokal dan internasional serta ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi serta sistem transportasi modern dan berkelanjutan merupakan aspek penting dari smart mobility. Pada smart environment dijelaskan oleh kondisi alam yang menarik seperti iklim, ruang hijau, dll. Pengelolaan sumber daya dan juga oleh upaya perlindungan lingkungan. Akhirnya, smart living terdiri dari berbagai aspek kualitas hidup seperti budaya, kesehatan, keselamatan, perumahan, pariwisata, dan lain-lain.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini, Kota Bandung juga memiliki konsep smart city yang memiliki 10 dimensi, yaitu Smart Government, Smart Education, Smart Transportation, Smart Health, Smart Energy, Smart Surveillance, Smart Environment, Smart Society, Smart Payment, dan Smart Commerce. Beberapa dimensi yang dicanangkan oleh Kota Bandung, adapula yang selaras dengan konsep smart city. Sehingga dari keselarasan yang dimiliki, penulis menggunakan konsep smart city untuk mengetahui bahwa kegiatan kerjasama *Sister City* kota Bandung

---

<sup>31</sup> Housing.

dengan kota diluar negeri mampu terimplementasikan dalam rangka mewujudkan *Smart City* kota Bandung.

### 1.5.3 Pembangunan Perkotaan

Pembangunan adalah suatu usaha perubahan untuk menciptakan kehidupan dalam negara dan masyarakat menjadi lebih baik dan lebih maju dari kondisi yang sekarang. Pembangunan juga dapat disebut sebagai proses menuju perubahan yang telah direncanakan oleh kota melalui berbagai macam pilihan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan tata nilai yang berkembang di masyarakat.<sup>32</sup>

Konsep pembangunan kota sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan konsep pembangunan pada umumnya. Dalam hal ini kota hanya sebagai sasaran dari pembangunan. Menurut Adisasmita kota adalah suatu wilayah dimana dalamnya terdapat penduduk atau warga masyarakat yang hidup di wilayah tersebut dengan adanya kegiatan yang dilakukan dalam hal ekonomi, administrasi pemerintahan, maupun sosial budaya.<sup>33</sup>

Suatu kota yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan kepadatan pemukiman penduduk yang cukup besar pula, melakukan kegiatan yang lebih berdominasi pada kegiatan jual beli, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan maupun pariwisata. Adapun tujuan dari pembangunan perkotaan ini ialah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk bertempat tinggal dan yang akan

---

<sup>32</sup> Rustiadi Ernan and Dkk, *Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah* (Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia, 2009).

<sup>33</sup> Adisasmita Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

melakukan suatu usaha, serta melengkapi kebutuhan dengan memberikan suasana kehidupan yang lebih nyaman.

Secara lebih rinci dapat digambarkan bahwa suatu kota meliputi konsentrasi daerah pemukiman berpenduduk cukup besar dan dengan kepadatan yang relatif tinggi dimana kegiatan penduduk didominasi oleh kegiatan nonpertanian, seperti industri, perdagangan dan jasa, baik di bidang keuangan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Pembangunan ruang perkotaan bertujuan untuk : (1) memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat berusaha dan tempat tinggal, baik dalam kualitas maupun kuantitas dan (2) memenuhi kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai, tenteram, dan sejahtera.

Pembangunan kota harus diupayakan untuk lebih meningkatkan produktifitas yang dapat mendorong sektor - sektor perekonomian, akan tetapi pengembangannya perlu memperhatikan ketersediaan sumberdaya, agar pemanfaatan sumberdaya untuk pelayanan sarana dan prasarana kota lebih efisien. Pembangunan perkotaan dilaksanakan dengan mengacu pada pengembangan investasi yang berwawasan lingkungan, sehingga tidak membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan tidak merusak kekayaan budaya daerah. Hal tersebut juga diperlukan agar tercipta keadilan yang tercermin pada pemerataan kemudahan dalam memperoleh penghidupan perkotaan, baik dari segi prasarana dan sarana maupun dari lapangan pekerjaan.

Widyaningsih menyebutkan aspek-aspek kota terdiri dari 3 komponen, yaitu:<sup>34</sup>

### **1. Aspek Fisik**

Aspek Fisik meliputi pola tata guna tanah yaitu penataan atau pengaturan penggunaan tanah, dan ruang yang merupakan sumber daya alam. Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang terencana atau tidak. Dalam tata ruang terdapat penataan ruang yaitu proses penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan elemen - elemen pembentuk meliputi penggunaan dan rencana penggunaan lahan, kebutuhan dan keinginan individu, sarana dan prasarana transportasi, tipe dan fungsi bangunan, kegiatan individu atau kelompok yang rutin, kependudukan, potensi fisik serta persepsi dan perilaku.

### **2. Aspek Sosial**

Aspek sosial menyangkut masalah kependudukan yang terkait dengan kota antara lain adalah masalah perkembangan, migrasi, aktifitas ekonomi, tenaga kerja dan beban ketergantungan. Dalam perencanaan penduduk dapat menjadi indikator perkembangan kota, yang salah satu aspeknya adalah pergerakannya. Aspek - aspek yang menyangkut sumber daya manusia terdiri atas keadaan penduduk (jumlah, sebaran, struktur, pendidikan), proses penduduk (alamiah dan buatan) dan lingkungan sosialnya (pola kontrol, kegiatan dan konstruksi).

---

<sup>34</sup> Widyaningsih and Nikken Setyowati, "Relevansi Preferensi Penduduk Terhadap Fasilitas Kota Yang Mempengaruhi Faktor Perkembangan Kota," *Plannit Journal*, 2001, 46.

### **3. Aspek Ekonomi**

Fungsi dasar kota adalah untuk menghasilkan penghasilan yang cukup melalui produksi barang dan jasa. Ekonomi perkotaan dapat ditinjau dari tiga bagian yaitu (1) ekonomi pemerintah meliputi pelaksanaan pemerintahan kota, (2) ekonomi swasta terdiri atas berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta, (3) ekonomi khusus terdiri atas bermacam - macam organisasi nirlaba. Ekonomi yang mendasari kota juga tercermin pada fasilitas dan bentuk fisiknya.

#### **1.6 Metodologi Penelitian**

##### **1.6.1 Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi prinsip dasar adalah Implementasi Kerjasama *Sister City* kota Bandung dalam Rangka Mewujudkan Konsep *Smart City*. Kemudian pengajuan premis minor dilakukan pada analisis dari bahan-bahan yang telah diperoleh kemudian dikupas dalam Bab selanjutnya, sehingga akan diperoleh argumen dasar.

##### **1.6.2 Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi berdasarkan kenyataan yang ada dan didukung oleh konsep yang digunakan. Mendeskripsikan bagaimana implementasi kerjasama *Sister City* kota Bandung dalam rangka mewujudkan konsep *Smart City*.

### **1.6.3 Teknik Analisa Data**

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis analisa data kualitatif. Dalam analisis data kualitatif datanya tidak dapat dihitung dan berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun dalam bentuk angka-angka. Disamping itu, penelitian ini bersifat eksplanativ yang bertujuan memberikan gambaran mengenai situasi atau kejadian yang terjadi. Data-data yang terkumpul melalui media tertulis kemudian disusun, dianalisa dan disajikan untuk memperoleh gambaran sistematis tentang kondisi dan situasi yang ada. Unit analisa pada Pemerintah kota Bandung yang melakukan kegiatan kerjasama *Sister City* dalam rangka mewujudkan konsep Smart City kota Bandung.

### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer yang dimaksud ialah berupa studi literature, website resmi sister city kota Bandung, Jurnal-jurnal terkait Sister City dan Smart City kota Bandung. Teknik pengumpulan data sekunder yang dimaksud ialah berupa wawancara dan observasi terhadap staff divisi fungsional umum bagian kerjasama luar negeri di kota Bandung untuk mencapai kesimpulan yang akan menguatkan argumen dasar.



## **1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.6.5.1 Batasan Waktu**

Untuk membatasi pembahasan agar tetap fokus pada tujuan penelitian maka penulis memberi batasan waktu dan penulis berharap rumusan masalah akan terjawab dalam penelitian ini. Batasan waktu dalam penelitian ini adalah Implementasi Kerjasama Sister City kota Bandung dalam rangka mewujudkan konsep Smart City pada masa pemerintahan Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung masa jabatan 2013-2018.

### **1.6.5.2 Batasan Materi**

Batasan Materi merupakan ruang bagi sebuah peristiwa yang meliputi cakupan materi dan daerah studi. Adapun batasan materi dari penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana upaya Pemerintah Kota Bandung mengimplementasikan Konsep Smart City dengan memanfaatkan kerjasama Sister City pada masa pemerintahan Ridwan Kamil.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

**Tabel 1.2 Posisi Sistematika Penulisan**

<b>BAB</b>	<b>Judul</b>	<b>Pembahasan</b>
BAB I	Pendahuluan	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Konsep 1.5.1 Sister City 1.5.2 Smart City 1.5.3 Pembangunan Perkotaan 1.6 Metodologi Penelitian 1.6.1 Variabel Penelitian 1.6.2 Tipe Penelitian

		1.6.3 Teknik Analisa Data 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.5.1 Batasan Waktu 1.6.5.2 Batasan Materi 1.7 Sistematika Penulisan
BAB II	Perkembangan Kerjasama Sister City Kota Bandung	2.1 Makna Kerjasama Sister City Bagi Kota Bandung 2.2 Sejarah Perkembangan Sister City Kota Bandung 2.2.1 Kerjasama Sister City Bandung dan Braunschweig 2.2.2 Kerjasama Sister City Bandung dan Fort Worth 2.2.3 Kerjasama Sister City Bandung dan Suwon 2.2.4 Kerjasama Sister City Bandung dan Liuzhou 2.2.5 Kerjasama Sister City Bandung dan Seoul
BAB III	Implementasi Kerjasama Sister City untuk Mewujudkan Konsep Smart City di Era Pemerintahan Ridwan Kamil	3.1 Implementasi Konsep Smart City Kota Bandung 3.2 Implementasi Kebijakan Konsep Smart City Kota Bandung 3.3 Hasil Hubungan Kerjasama Sister City dalam Mewujudkan Konsep Smart City Kota Bandung 3.3.1 Dimensi Smart Environment dan Society dalam Kerjasama Sister City Bandung dan Braunschweig 3.3.2 Dimensi Smart Education, Health, Environment, Surveillance dalam Kerjasama Sister City Bandung dan Fort Worth 3.3.3 Dimensi Smart Education dan Society dalam Kerjasama Sister City Bandung dan Suwon 3.3.4 Dimensi Smart Environment dalam Kerjasama Sister City Bandung dan Liuzhou 3.3.5 Dimensi Smart Governance, Society, Payment, Environment dalam Kerjasama Sister City Bandung dan Seoul
BAB IV	Penutup	4.1 Kesimpulan 4.2 Saran